

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara pendidikan, namun pendidikan masih menjadi persoalan di negara Indonesia terkait dengan akses pendidikan yang belum merata dan adanya kesenjangan layanan pendidikan kepada masyarakat. Misalnya saja Ibu Kota Jakarta. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menyebut pada tahun 2022, akses pendidikan di Jakarta tidak merata. Tidak merata artinya kesempatan untuk dapat bersekolah berbeda dengan kesempatan dengan mereka yang dari keluarga miskin (Azzahra, 2022). Sisi lain, Indonesia tengah berupaya untuk membangun negara ini dan membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Putra, 2021).

Penting bagi para generasi muda Indonesia untuk menjunjung tinggi pendidikan hingga perguruan tinggi karena pada tingkatan tersebut individu dianggap menguasai dalam bidang tertentu sehingga mendapat peluang besar untuk turut membangun negara lebih baik dan memperbaiki taraf hidup. Namun, masalah yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara keinginan, potensi dengan kesempatan yang terhalang dengan kemampuan dalam finansial untuk membiayai pendidikan itu sendiri. Kendala tersebut menyebabkan belum meratanya akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi remaja.

Ketidakmerataan ini dibuktikan dengan hasil data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Indonesia yang diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan dilansir dalam laman web resmi mpr.go.id bahwa dari 2 sampai 3 juta lulusan SMA dan SMK 38% yang dapat kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi (MPR RI, 2022). Data ini menunjukkan bahwa hanya sedikit “generasi emas” di Indonesia yang menyandang gelar Sarjana. Deputi Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi

Beragama (Kemenko PMK), Agus Sartono juga mengungkapkan dari 3,7 juta lulusan SMA/SMK/MA setiap tahunnya, sekitar 1,9 juta orang yang tidak melanjutkan kuliah (Ashari, 2021). Masih minimnya jumlah siswa SMA tidak melanjutkan perguruan tinggi menurut Bamsuet Soesatyo, Ketua MPR RI disebabkan faktor ekonomi.

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pendidikan tersebut mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab V pasal 12 (1.c) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa setiap peserta didik mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu dalam membiayai pendidikan (Kemenpakraf, 2003). Peraturan UU tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan membuat program beasiswa perguruan tinggi bagi siswa berprestasi dan berasal dari keluarga tidak mampu.

Pemerintah daerah tersebut diantaranya Pemerintah Kota Bekasi, pemerintah provinsi Jawa Barat melalui program *Jabar Future Leaders Scholarship*, DKI Jakarta melalui program Kartu Indonesia Pintar dan pemerintah daerah lainnya. Khusus pembahasan terkait Kota Bekasi, diadakan beasiswa pendidikan untuk keluarga tidak mampu agar Kota Bekasi memiliki generasi penerus yang berkualitas dalam segi pendidikan dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Pusat (BPS) rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi yaitu 11,44 tahun atau tidak sampai tamat sekolah SMA, (BPS Pusat, 2022).

Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan didapati apabila tingkat pendidikan yang rendah karena kurangnya produktivitas manusia sehingga minim pengetahuan dan keahlian. Faktor kemiskinan karena pendidikan yang rendah didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridzky Giovanni pada tahun 2018 mengenai analisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Hasil dari penelitian ini adalah

rendahnya partisipasi pada tingkat sekolah SD, SMP, SMA dan PT di Pulau Jawa menyebabkan belum bisa untuk menurunkan angka kemiskinan di Pulau Jawa. Penelitian tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi partisipasi untuk sekolah SD, SMP, SMA dan PT maka akan membantu dalam menurunkan angka kemiskinan di Pulau Jawa (Giovanni, 2018).

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Tety Handayani pada rentang tahun 2014 hingga 2016, jumlah penduduk miskin di wilayah Kota Bekasi meningkat secara signifikan. Pada tahun 2014 sebanyak 13.971 KK, 2015 sebanyak 20.000 KK dan 2016 sebanyak 26.000 KK. kemiskinan ini disebabkan karena kecilnya peluang mendapat pendidikan dan kesehatan yang layak (Otonominews, 2017). Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kemiskinan di tahun 2016 dan masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi, Baznas Kota Bekasi sebagai salah satu lembaga sosial dibawah binaan Pemerintah Kota Bekasi, pada tahun 2016 mengadakan program beasiswa sarjana yang bernama 1RD 1S dengan memberdayakan zakat yang telah disalurkan dari para muzzaki.

Program 1RD 1S menjadi program unggulan di Baznas Kota Bekasi karena sebagai wilayah Baznas yang dipilih oleh Baznas Pusat menyelenggarakan program beasiswa tersebut dan sudah berhasil membawa 60 anak yang berasal dari kaum dhuafa menjadi sarjana pada tahun 2021. Pada tahun 2021-2022 telah ada 24 mahasiswa yang dibiayai oleh Baznas Kota Bekasi melalui program 1RD 1S tersebut.

Baznas Kota Bekasi melakukan beberapa upaya agar beasiswa 1RD 1S tidak salah sasaran dan berjalan dengan efektif. Upaya agar tepat sasaran dengan membubuhkan beberapa persyaratan sehingga mendindikasi jika anak tersebut adalah kaum dhuafa yang membutuhkan biaya pendidikan. Melalui pembentukan tim survei yang akan mengukur tingkat kedhuafaan calon penerima beasiswa 1RD 1S. Apabila tidak memenuhi kriteria sebagai masyarakat dhuafa maka akan didiskualifikasi sebagai penerima beasiswa.

Penerima beasiswa, Arul, menerangkan jika Baznas Kota Bekasi mengamati secara detail kondisi kedhuafaan calon penerima beasiswa dan teman-teman yang satu angkatannya pun memang benar adalah individu yang layak menerima beasiswa 1RD 1S. Menurut pengalaman Penerima beasiswa beberapa kondisi yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya rumah bukan punya pribadi, dan penghasilan orang tua yang tidak tetap.

Efektifnya program 1RD 1S Baznas Kota Bekasi, sedikit masyarakat yang mengetahui adanya program beasiswa tersebut terlebih pada persyaratannya. Hal itu disebabkan oleh minimnya sosialisasi pada tahun 2016 hingga 2020. Situasi saat itu, Baznas Kota Bekasi belum memanfaatkan media sosial sebagai saluran dalam menjembatani informasi ke masyarakat Kota Bekasi. Sosialisasi pada program ini bekerja sama dengan organisasi Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) yang berada di setiap kecamatan Kota Bekasi dan para Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Staf Bidang 4 Administrasi SDM dan Umum pada periode 2016-2020 terkait sosialisasi program 1RD 1S bekerja sama dengan Organisasi Kelompok Kerja Pengawas yang bertugas membantu tim Baznas Kota Bekasi untuk mensuplai siswa-siswi madrasah di wilayah kota Bekasi yang layak menerima beasiswa sarjana. Organisasi ini juga membantu dalam penyeleksian calon penerima beasiswa sehingga Baznas Kota Bekasi langsung menerima 12 orang yang layak diberikan program beasiswa Namun, tetap di observasi langsung oleh pihak Baznas Kota Bekasi.

Para UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilibatkan dalam sosialisasi program beasiswa 1RD 1S. Berdasarkan hasil wawancara dari Staf Bidang 4 Administrasi SDM dan Umum, dalam menyampaikan ke UPZ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui *whatsapp group* yang berisi formulir pendaftaran beasiswa 1RD 1S.

Penerima beasiswa juga menerangkan jika tidak ada sosialisasi dari pihak perangkat daerah kepada warga sekitarnya sehingga banyak yang tidak mengetahui program-program Baznas Kota Bekasi khususnya program 1RD 1S. Penerima beasiswa sendiri ada yang mendapat informasi adanya program ini dari surat rekomendasi dari masjid dan ada pula yang di rekomendasikan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan keterangan tersebut hambatan yang menjadikan masyarakat tidak dapat mengetahui informasi terkait program beasiswa 1RD 1S, karena sosialisasinya dilakukan secara tidak terbuka, dimana pihak Baznas Kota Bekasi bekerja sama dengan organisasi Kelompok kerja pengawas (POKJAWAS) dan melalui media group whatsapp ke UPZ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi serta tidak ditemukan menggunakan media sosial ketika periode pertama tahun 2016 sampai 2021 dan jika ke siswa-siswi umum melalui perantara surat.

Berdasarkan permasalahan tersebut terkait pemerataan informasi tentang program beasiswa 1RD 1S pada masyarakat, maka diperlukan komunikasi publik untuk menyampaikan informasi mengenai program beasiswa 1RD 1S tersebut. Komunikasi publik merupakan suatu proses komunikasi yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka didepan khalayak yang lebih besar, (Cangara, 2014). Tujuan umum dari komunikasi publik adalah untuk menginformasikan, mengadakan kerja sama dan menghibur (Solong & Asri, 2021). Komunikasi publik juga perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menenangkan kritik masyarakat dan menciptakan kepatuhan pada sebuah kebijakan pemerintah sebagaimana menurut Holts dan Moodie, masyarakat memandang komunikasi publik seperti “Skeptisisme, karena organisasi cenderung mengadopsi "pembicaraan halus" dan retorika kosmetik yang dirancang untuk menenangkan kritik dan menciptakan topeng kepatuhan yang ditujukan untuk mengurangi tekanan eksternal”(Ramadani, 2019).

Maka penting bagi perangkat pemerintah baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi publik supaya mendapat dorongan secara interpersonal, merubah perilaku melalui komunikasi yang bersifat persuasi dan memperluas jangkauan untuk berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh instansi atau organisasi itu sendiri. Komunikasi publik pada era digital ini sudah dapat dilakukan melalui media dan tatap muka.

Komunikasi publik menjadi jenis komunikasi yang strategis dalam menunjang keberhasilan suatu program yang berkenaan dengan publik. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan komunikasi publik dalam menosialisasikan kepada mahasiswa UIN SU terkait informasi beasiswa Baznas. Hasil dari penelitian ini adalah, Humas yang melakukan komunikasi publik melalui media sosial dan tatap muka berdampak pada pemenuhan informasi mahasiswa pada informasi tentang beasiswa Baznas (Cahaya et al., 2022).

Maka, jenis komunikasi ini dapat menjadi alternatif bagi Baznas Kota Bekasi dalam mensosialisasikan program 1RD 1S. Komunikasi publik memuat beberapa komponen dan yang relevan pada abad ini adalah menurut DeVito dalam (Rosalin et al., 2020), seperti sumber, penerima, *enkoding-dekoding*, pesan, saluran, efek, umpan balik dan gangguan. Sejalan dengan penelitian ini yang mengacu pada analisis komunikasi publik yang dilakukan oleh Baznas Kota Bekasi dalam mensosialisasikan program bidang pendidikan yaitu program beasiswa satu rumah dhuafa satu sarjana. Berhubung dengan jumlah partisipasi yang statis dan masyarakat belum banyak yang mengetahui beragam program Baznas Kota Bekasi, maka penelitian ini ingin mendeskripsikan komunikasi publik yang dilakukan oleh Baznas Kota Bekasi dalam mensosialisasikan program 1RD 1S.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui mekanisme komunikasi publik yang dilakukan oleh instansi Baznas Kota Bekasi dalam menyosialisasikan program beasiswa 1 RD 1S. Untuk itu, penelitian ini diberi judul **“Komunikasi Publik Badan Amil Zakat Nasional**

(BAZNAS) Kota Bekasi pada Program Satu Rumah Dhuafa Satu Sarjana (1RD 1S)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana komunikasi publik BAZNAS Kota Bekasi dalam upaya sosialisasi program beasiswa “Satu Rumah Satu Sarjana” (1RD 1S)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi publik Baznas Kota Bekasi dalam upaya sosialisasi program beasiswa 1RD 1S.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya pada ranah ilmu komunikasi tentang komunikasi publik organisasi dalam menyosialisasikan kebijakan–kebijakan organisasi supaya efektif dan tercapainya tujuan organisasi serta menambah wawasan tentang komunikasi publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Kota Bekasi

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam pengoptimalan distribusi melalui program beasiswa. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan evaluasi bagi Baznas Kota Bekasi dalam memaksimalkan aktivitas sosialisasi program beasiswa sarjana 1RD 1S khususnya pada bidang pengumpulan sosialisasi dan bidang administrasi SDM dan umum agar lebih efektif dalam pendistribusian program beasiswa dan meratanya informasi program beasiswa 1RD 1S.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi terkait dengan media pesan dan kegiatan yang dilakukan Baznas Kota Bekasi dalam rangka mensosialisasikan program beasiswa sehingga masyarakat tidak tertinggal informasi tentang program beasiswa.

c. Bagi Lembaga Sosial Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan referensi atau informasi bagi lembaga sosial lainnya agar lebih optimal dan sukses dalam mensosialisasikan program beasiswa dan meningkatnya angka partisipasi pendaftar program beasiswa.